**PERATURAN DESA WONOKERTO**

**NOMOR TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH**

**DESA WONOKERTO KECAMATAN GUCIALIT**

**TAHUN 2015 – 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**

**KECAMATAN GUCIALIT**

**DESA WONOKERTO**

**RPJM – DESA**

**TAHUN 2015 – 2020**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan harapan bagi semua masyarakat. Hal tersebut merupakan perwujudan dari sebuah proses pembangunan baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat itu sendiri. Terwujudnya hasil dari pemerintahan yang baik salah satunya merupakan perwujudan dari proses penyerapan aspirasi yang ada di masyarakat. Melalui hasil dari pelaksanaan musyawarah yang ada di desa, masyarakat langsung bisa menyampaikan gagasan, usulan, saran dan kritik yang baik sehingga dapat secara bersama-sama dengan pihak pemerintah membangun pemerintahan yang baik, sesuai dengan cita-cita bangsa dan Negara.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai perwujudan dari hasil kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat, maka sangat perlu dibuatkan perencanaan desa dengan baik. Oleh karena itu, guna membuat perencanaan pemerintahan yang baik di tingkat desa, maka perlu disusun Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah yang sesuai dengan masa jabatan dari Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa merupakan proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program yang ditawarkan oleh masing-masing calon. Oleh karena itu, rencana pembangunan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari agenda-agenda yang ditawarkan oleh Kepala Desa pada saat berkampanye, menjadi rencana pembangunan jangka menengah desa. Berkaitan dengan pembangunan Desa maka ada beberapa masalah yang seringkali ditemui di berbagai Desa, perlu mendapat perhatian dan segera diantipasi, diantaranya terbatasnya ketersediaan sumberdaya manusia yang baik dan professional, terbatasnya ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik yang berasal dari kemampuan Desa itu sendiri (internal) maupun sumber dana dari luar (eksternal) belum tersusunnya kelembagaan sosial-ekonomi yang mampu berperan secara efektif, belum terbangunnya sistem dan regulasi yang jelas dan tegas dan kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat secara lebih kritis dan rasional. Hal ini juga sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Proses pembuatan RPJM Desa ini dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Musyawarah perencanaan pembanguan desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Keberadaan RPJM-Desa merupakan dokumen perencanaan yang penting bagi keberadaan dan arah pembangunan Desa Wonokerto selama 6 (enam) tahun kedepan. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa ini memuat visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

**1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 27 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 29 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019.
    1. **Pengertian**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Dalam pembuatan dokumen RPJM Desa ini dilakukan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Dalam dokumen RPJM Desa ini memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

* 1. **Maksud dan Tujuan**
* **Maksud**

RPJM Desa Wonokerto ini dibuat dengan maksud:

1. Sebagai pedoman pada Pemerintah Desa tentang kegiatan-kegiatan yang ada di desa selama masa jabatan Kepala Desa.
2. Sebagai penjabaran dari visi dan misi Kepala Desa dalam melaksanakan program Kepala Desa selama masa jabatannya.

* **Tujuan**

RPJM Desa Wonokerto ini dibuat dengan tujuan:

* 1. Sebagai pedoman Perencanaan Pembangunan Desa yang memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
  2. Memberikan gambaran prioritas permasalahan desa yang harus ditanggulangi dan potensi unggulan yang berpeluang untuk dikembangkan melalui program pembangunan desa.
  3. Memberikan arah program dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan program pemerintah Kabupaten Lumajang.

**BAB II**

**PROFIL DESA**

**2.1 Kondisi Desa**

**2.1.1 Sejarah Desa**

Desa Wonokerto berdiri pada tahun 1916. Berdasarkan cerita dari para sesepuh Desa Wonokerto, bahwa konon nama Wonokerto berasal dari abad ke-15 sejak kerajaan Minak Koncar dari Lamajang melarikan diri beserta pengikutnya dari kerajaan Adipati Minak Jinggo dari Blambangna, mereka melewati hutan belantara. Desa Wonokerto berasal dari kata bahasa jawa WONO KERTO. Wono artinya hutan. Dahulu asal mula berdirinya Desa Wonokerto terbentuk pada masa Kerajaan Minak Koncar tetapi pada masa itu masih belum ada Kepala Desa, barulah pada jaman Penjajahan Jepang terbentuk Pemimpin Desa atau Kepala. Desa Wonokerto di bagi menjadi 4 Dukuhan yaitu : WONOASIH, WONOSARI, WONOAYU dan WONOREJO.

Para Pejabat Kepala Desa Wonokerto semenjak berdirinya Desa Wonokerto adalah sebagai berikut:

**Tabel 1**

Daftar Nama Kepala Desa Wonokerto

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **N A M A** | **MASA JABATAN** | **KETERANGAN** |
| 1 | SOEMAR | 1916 – 1939 | Petinggi |
| 2 | RATEMON | 1939 – 1963 | Petinggi |
| 3 | KERTO JATI / TOLAR | 1964 – 1989 | Petinggi |
| 4 | H. SADINO MUKTI | 1989 – 1997 | Petinggi |
| 5 | SAMPURNO | 1997 – 2006 | Petinggi |
| 6 | H. SADINO MUKTI | 2006 – 2013 | Kepala Desa |
| 7 | Hj. IMMA SAROH | 2013 s/d skrg | Kepala Desa |

**2.1.2 Demografi**

Pentingnya memahami kondisi Desa untuk mengetahui keterkaitan perencanaan dengan muatan pendukung dan permasalahan yang ada, memberikan arti penting keputusan pembangunan sebagai langkah mendayagunakan dan penyelesaian masalah di masyarakat.

Desa Wonokerto merupakan salah satu dari 9 desa di wilayah Kecamatan Gucialit, yang terletak 7 Km ke arah Selatan dari Kecamatan Gucialit, Desa Wonokerto mempunyai luas wilayah seluas 511,51 hektar. Adapun batas-batas wilayah desa Wonokerto :

|  |  |
| --- | --- |
| **BATAS DESA** | |
| Sebelah Utara | : Berbatasan dengan Desa Kenongo |
| Sebelah Selatan | : Berbatasan dengan Desa Bedayu Talang  (Kecamatan Senduro) |
| Sebelah Timur | : Berbatasan dengan Desa Bodang  (Kecamatan Padang) |
| Sebelah Barat | : Berbatasan dengan Desa Pakel |

Iklim Desa Wonokerto, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Wonokerto Kecamatan Gucialit.

Desa Wonokerto terdiri dari 4 dusun diantaranya Dusun Wonoasih; Dusun Wonosari; Dusun Wonoayu; Dusun wonorejo dengan jumlah penduduk **3.266** Jiwa atau **962** KK, dengan perincian sebagaimana tabel berikut;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Jenis Kelamin** | **Jumlah** |
| 1. | Laki – Laki | 1.687 |
| 2. | Perempuan | 1.579 |
| 3. | Kepala Keluarga | 962 |

1. **Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur**

Data ini bermanfaat untuk mengetahui laju pertumbuhan penduduk dan mengetahui jumlah angkatan kerja yang ada. Data penduduk menurut golongan umur di Desa Wonokerto dapat dilihat pada Tabel berikut. dibawah ini :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Umur (Tahun)** | **Jumlah (Jiwa)** |
| 1. | 0 Bln – 12 Bln | 93 |
| 2. | 12 Bln – 5 Thn | 324 |
| 3. | 5 Thn – 10 Thn | 564 |
| 4. | 10 Thn – 25 Thn | 926 |
| 5. | 25 Thn – 60 Thn | 1.220 |
| 6. | 60 Thn tahun keatas | 139 |
| **Jumlah** | | **3.266** |

*Sumber Data : Data Potensi Sosial Ekonomi Desa/Kelurahan   
 Tahun 2015*

1. **Jumlah Penduduk Menurut Agama**

Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan masyarakat Desa Wonokerto mayoritas beragama Islam, dengan rincian data sebagai berikut :

* Islam : 3.266 orang
* Kristen : 0 orang
* Katholik : 0 orang
* Hindu : 0 orang
* Budha : 0 orang

1. **Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan**

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumberdaya manusia. Proses pembangunan Desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Akses untuk mendapatkan pendidikan cukup sulit karena jarak tempat pendidikan untuk tingkat SMA sangat jauh dengan pemukiman warga, sehingga kalau dilihat dari data statistik masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat merupakan suatu permasalahan yang harus segera dipecahkan terutama dalam membangun kesadaran masyarakat akan arti pentingya pendidikan. Data penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada Tabel berikut. berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Tingkat Pendidikan** | **Jumlah ( orang )** |
| 1. | Tidak Sekolah / Buta Huruf | ‘- |
| 3. | Tidak Tamat SD/Sederajat | 378 |
| 4. | Tamat SD / sederajat | 1.895 |
| 5. | Tamat SLTP / sederajat | 227 |
| 6. | Tamat SLTA / sederajat | 46 |
| 7. | Tamat D1, D2, D3 | 2 |
| 8. | Sarjana / S-1 | 6 |

*Sumber Data: Data Potensi Sosial Ekonomi Desa/Kelurahan*

*Tahun 2015*

1. **Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian**

Mata pencaharian penduduk di Desa Wonokerto sebagian besar masih berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Data menurut mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tani** | **Dagang** | **Buruh Tani** | **PNS/TNI/Polri** | **Swasta** | **Lain-lain** |
| 589 | 81 | 371 | 20 | 117 | 2.088 |

**2.1.3 Keadaan Sosial**

Banyaknya kegiatan Ormas di Desa Wonokerto. seperti Remaja Masjid, Karang Taruna, Jamiyah Yasin, Tahlil, PKK Dharma wanita, Posyandu, Kelompok Arisan merupakan aset desa yang bermanfaat untuk dijadikan media penyampaian informasi dalam setiap proses pembangunan desa pada masyarakat.

**KESEJAHTERAAN WARGA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **Jumlah** | |
| 1.  2.  3.  4. | Jumlah Kepala Keluarga  Jumlah penduduk miskin  Jumlah penduduk sedang  Jumlah penduduk kaya | 962  530  308  124 | KK  KK  KK  KK |

PENGANGGURAN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **Keterangan** |
| 1 | Jumlah penduduk usia 15 s/d 55 yang belum bekerja | 407 orang |
| 2 | Jumlah angkatan kerja usia 15 s/d 55 tahun | 1.773 orang |

**2.1.4 Keadaan Ekonomi**

Mayoritas mata pencarian penduduk Desa Wonokerto bergerak dibidang pertanian. Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah tersedianya lapangan pekerjaan yang kurang memadai dengan perkembangan penduduk sebagaimana tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lumajang. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa adalah melakukan usaha perluasan kesempatan kerja dengan melakukan penguatan usaha kecil pemberian kredit sebagai modal untuk pengembangan usaha khususnya di bidang perdagangan.

Tingkat angka kemiskinan Desa Wonokerto. yang masih tinggi menjadikan Desa Wonokerto. harus bisa mencari peluang lain yang bisa menunjang peningkatan taraf ekonomi bagi masyarakat.

Kekayaan Sumber Daya Alam yang ada di Desa Wonokerto amat sangat mendukung baik dari segi pengembangan ekonomi maupun sosial budaya. Selain itu letak geografis desa yang cukup strategis dan merupakan jalur transportasi yang mempertemukan 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Gucialit, Kecamatan Padang dan Kecamatan Senduro.

Pendapatan desa merupakan jumlah keseluruhan penerimaan desa yang dibukukan dalam APBDes setiap tahun anggaran. Menurut Peraturan Desa Wonokerto Nomor 02 Tahun 2017 bahwa Sumber Pendapatan Desa :

* 1. Sumber Pendapatan Desa

1. Pendapatan asli desa terdiri dari hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
2. Bagi hasil pajak daerah kabupaten untuk desa dan dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa yang merupakan pembagian untuk setiap desa secara proporsional;
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
4. Bantuan keuangan dari pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintah;
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
   1. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa;
   2. Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah.

Adapun Kekayaan desa terdiri dari :

a. Tanah kas desa

b. Bangunan desa yang dikelola desa

c. Lain-lain kekayaan milik desa

Desa Wonokerto sebagaian besar mata pencaharian penduduknya adalah petani yang mayoritas memeluk agama Islam dan juga memiliki kepatuhan terhadap adat dan tradisi.

**2.1.5 Prasarana dan Sarana Desa**

Pembangunan masyarakat desa diharapkan bersumber pada diri sendiri (kemandirian) dan perkembangan pembangunan harus berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang seimbang agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa menjadi lebih baik.

1. Prasarana kesehatan

* Posyandu : 5 unit
* Lansia : - unit
* Posbindu : - unit
* Polindes : 1 unit
* Bidan Desa : 1 orang

2. Prasarana Pendidikan

* Taman Kanak – kanak / TK : 3 unit
* SD / MI : 3 unit
* SLTP / MTs : 2 unit
* SLTA / MA : - unit
* TPA / TPQ : 9 unit

3. Prasarana Umum Lainnya

* Tempat ibadah : 22 unit
* Lapangan Olahraga : 2 unit
* Gedung Serba Guna : - unit

Pengelolaan sarana dan prasana merupakan Tahap keberlanjutan dimulai dengan proses penyiapan masyarakat agar mampu melanjutkan pengelolaan program pembangunan secara mandiri. Proses penyiapan ini membutuhkan keterlibatan masyarakat, agar masyarakat mampu menghasilkan keputusan pembangunan yang rasional dan adil serta semakin sadar akan hak dan kewajibannya dalam pembangunan, mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, dan mampu mengelola berbagai potensi sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai kesuksesan dalam tahapan ini adalah:

1. Swadaya masyarakat merupakan faktor utama penggerak proses pembangunan,
2. Perencanaan secara partisipatif, terbuka dan demokratis sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan dan masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggalang berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan,
3. Kapasitas pemerintahan daerah meningkat sehingga lebih tanggap dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain dengan menyediakan dana dan pendampingan.
4. Keberadaan fasilitator/konsultan atas permintaan dari masyarakat atau pemerintah daerah sesuai keahlian yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan agar masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggalang berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan.

**2.2. Kondisi Pemerintahan Desa**

**2.2.1 Pembagian Wilayah Desa**

Luas wilayah Desa Wonokerto dengan luas wilayah 511,51 ha. Desa Wonokerto terdiri dari empat dusun yaitu: Dusun Wonoasih, Dusun Wonosari, Dusun Wonoayu dan Dusun Wonorejo. Perangkat Desa menurut jenis jabatannya di Desa Wonokerto terdiri dari 1 Kepala Desa, 1 Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Tata Usaha dan Umum, Kaur Perencanaan, Kasi Pelayanan, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan dan 4 Kepala Dusun. Desa Wonokerto terdiri dari 8 Rukun Warga (RW) dan 21 Rukun Tangga (RT).

**2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa**

Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 06 tahun 2014 bahwa di dalam Desa terdapat tiga kategori kelembagaan Desa yang memiliki peranan dalam tata kelola Desa, yaitu: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di Tingkat Desa (Pemerintahan Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan Desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. BPD berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

**Bagan**

**Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan**

**Desa Wonokerto**

**KEPALA DESA**

**Hj. IMMA SAROH**

**SEKRETARIS DESA**

**MOCHAMAD LUKMAN NURHAKIM, SE**

**KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN**

**ACH. SUWARNO A**

**KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN**

**BAWON ROSYID**

**KEPALA SEKSI PELAYANAN**

**SITI NURJANAH**

**KAUR TATA USAHA DAN UMUM**

**SINGGIH**

**KAUR PERENCANAAN**

**HERU PURNOMO**

**KAUR KEUANGAN**

**ABDUL ROHMAN**

**KASUN WONOASIH**

**NGAWE**

**KASUN WONOSARI**

**PARNO**

**KASUN WONOAYU**

**ABD GHOFUR**

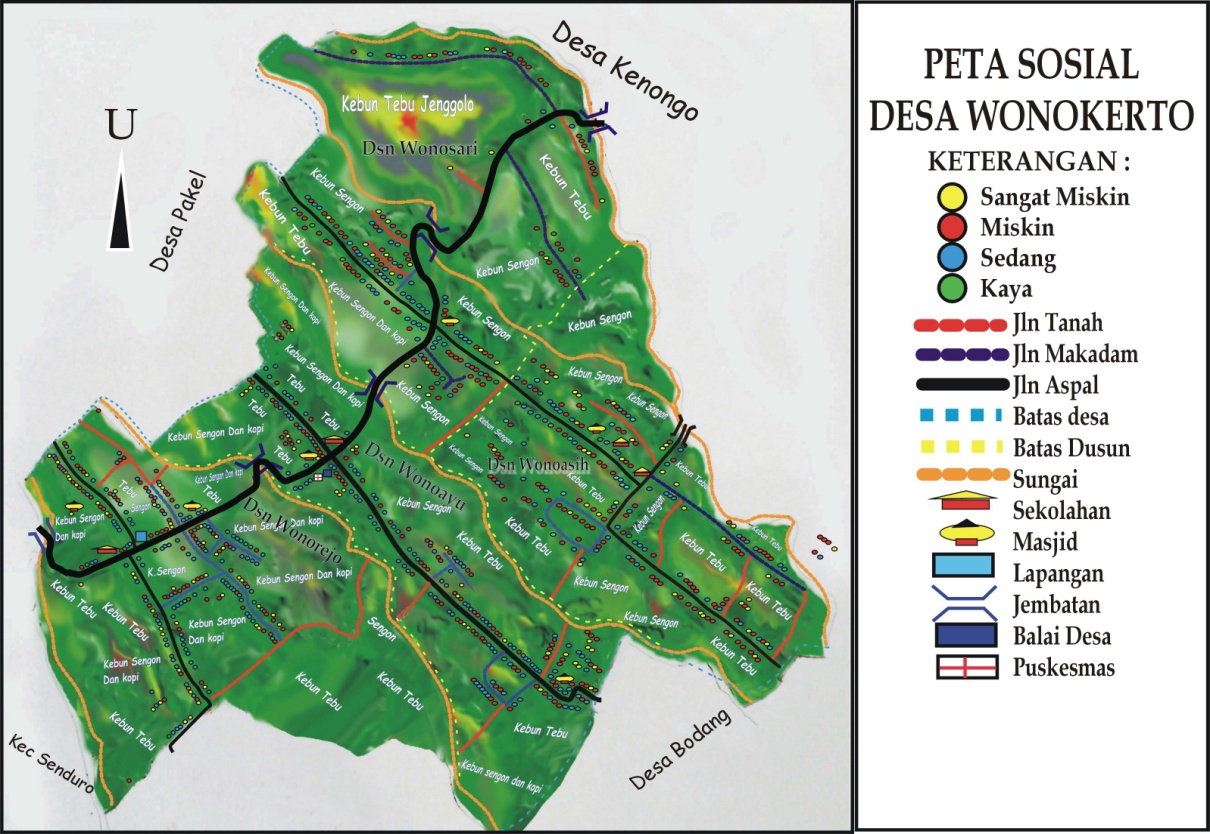
**KASUN WONOREJO**

**MAHRUS ZAINI**

**BAB III**

**MASALAH DAN POTENSI**

* 1. **MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET DESA**

****

**MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET DESA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **MASALAH** | **POTENSI** |
| 1 | Banyaknya jalan desa di wilayah pemukiman penduduk yang mengalami kerusakan | Tenaga Gotong Royong |
| 2 | Di beberapa lingkungan perumahan penduduk desa tidak sehat/tidak layak huni | PKK  Kader-Kader di desa  Pos Kesehatan Desa |
| 3 | Banyaknya anak-anak dan lansia yang terkena penyakit dan kurang gizi (gizi buruk) | Pos Kesehatan Desa  Posyandu  Kader Posyandu |
| 4 | Banyaknya lahan/pekarangan rumah penduduk yang tidak termanfaatkan dengan baik | Pekarangan rumah  Kader Desa  Petani |
| 5 | Minimnya sarana-prasaran dan teknologi tepat guna untuk kegiatan pengembangan dan pengolaan pasca panen | Lahan persawahan  Kelompok tani  Hasil panen |
| 6 | Mahalnya harga bahan/pakan ternak dan peralatan untuk mengembangan peternakan | Lahan  Peternak |
| 7 | Sulit/mahalnya harga bibit dan pupuk | Lahan Tebu |
| 8 | Minimnya sarana dan prasarana pendidikan usia dini dan TK | Lokal  Guru Pengajar |

* 1. **MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Masalah/Kegiatan/Keadaan** | **Pancaroba** | | | **Kemarau** | | | | **Musim Hujan** | | | | |
| **Mar** | **Apr** | **Mei** | **Jun** | **Jul** | **Agt** | **Sep** | **Okt** | **Nov** | **Des** | **Jan** | **Feb** |
| 1. | Musim tanam tebu |  |  |  |  | \*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* |  |  |  |  |  |
| 2. | Musim kering / sulit air |  |  | \*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\* |  |  |  |  |
| 3. | Banyak orang kawin |  | \*\*\* | \*\*\*\* |  | \*\* | \*\*\* |  |  |  |  | \*\*\*\* | \*\*\*\* |
| 4. | Kesehatan (banyak penyakit) | \*\*\* | \*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \*\*\* |

**MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **MASALAH** | **POTENSI** |
|  | Pada saat musim hujan terjadi banjir | * Saluran Air * Swadaya Masyarakat |
|  | Pada musim pancaroba banyak masyarakat desa terkena penyakit | * Mantri * Bidana * Posyandu * Kader Posyandu |
|  | Pada saat musim hujan banyak masyarakat terkena penyakit diare dan DBD (demam berdarah) | * Pos kesehatan desa * Bidan desa * Kader PKK * Posyandu * Kader Posyandu |
|  | Pada saat ada hajatan membutuhkan biaya tambahan | * Hasil panen |

* 1. **MASALAH DAN POTENSI DARI KELEMBAGAAN DESA**

**BAGAN KELEMBAGAAN DESA**

**MASALAH DAN POTENSI DARI KELEMBAGAAN DESA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **LEMBAGA** | **MASALAH** | **POTENSI** |
| 1 | PEMDES dan BPD | * Perangkat desa kurang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat * Kurang memahami/maksimal dalam menjalankan Tugas, Pokok dan Fungsinya * Masih bingung untuk menafkahi keluarga * Desa belum memiliki badan usaha yang mampu memberikan masukan/penghasilan kepada kas desa | * Perangkat lengkap * Sarana tersedia * Ada usaha yang bisa dikembangkan |
| 2 | LKMD | * Pengurus LKMD sebagian tidak tampak kegiatannya * Kurang memahami/maksimal dalam menjalankan Tugas, Pokok dan Fungsinya * Masih bingung untuk menafkahi keluarga | * Pengurus lengkap * Tenaga pengurus potensial |
| 3 | KELOMPOK TANI | * Minimnya pengetahuan petani tentang teknologi tepat guna * Sarana prasana menuju persawahan sangat minim | * Lembaga ada * Pengurus lengkap |
| 4 | SIMPAN PINJAM | * Pengurus simpan pinjam tidak bisa berkembang * Kurangnya modal | * Modal usaha ada * Pengurus lengkap |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **LEMBAGA** | **MASALAH** | **POTENSI** |
| 5 | KARANG TARUNA | * Pengurus Karang taruna tidak tampak kegiatannya * Kurang memahami/maksimal dalam menjalankan Tugas, Pokok dan Fungsinya * Sarana prasarana masih kurang maksimal | * Pengurus lengkap * Tenaga pengurus potensial |
| 6 | PKK | * Pengurus PKK tidak tampak kegiatannya * Kurang memahami/maksimal dalam menjalankan Tugas, Pokok dan Fungsinya * Sarana prasarana masih kurang maksimal | * Pengurus lengkap * Tenaga pengurus potensial * Ada program kerja * Sarana tersedia |
| 7 | SEKOLAH/  TEMPAT PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL | * Kegiatan belajar mengajar tidak terlaksana dengan maksimal * Sarana prasarana sekolah kurang memadai * Insentif tenaga pengajar masih rendah | * Tenaga Pengajar * Murid * Lahan pendidikan * Program kerja |
| 8 | POSKESDES | * Sebagian program kerja tidak dapat terlaksana * Sarana prasarana kesehatan kurang memadai * Insentif kader masih rendah * Pengurus/kader belum memahami/kurang maksimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya | * Gedung poskesdes * Kader Posyandu * Program kerja * Posyandu |

**BAB IV**

**RENCANA PRIORITAS PROGRAM 2015 – 2020**

1. **Visi dan Misi**

**4.1.1 Visi**

Visi adalah suatu gambaran tentang perencanaan keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Wonokerto ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Wonokerto seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Visi Desa Wonokerto adalah:

***“****Terwujudnya Masyarakat Desa Wonokerto Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Sejahtera dan Bermartabat Dalam Naungan Pemerintah Desa Yang Demokratis dan Amanah”*

Melalui visi ini diharapkan masyarakat menemukan gambaran kondisi masa depan yang lebih baik dan merupakan potret keadaan yang ingin dicapai, dibanding dengan kondisi yang ada saat ini. Melalui rumusan visi ini diharapkan mampu memberikan arah perubahan masyarakat pada keadaan yang lebih baik, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengendalikan dan mengontrol perubahan-perubahan yang akan terjadi, mendorong masyarakat untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik, menumbuhkan kompetisi sehat pada anggota masyarakat, menciptakan daya dorong untuk perubahan serta mempersatukan anggota masyarakat.

**4.1.2 Misi**

Misi merupakan turunan/penjabaran dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi desa selama masa jabatan kepala desa.

Untuk meraih Visi desa seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan aspek masalah dan potensi yang ada di desa yang berdasarkan Potret Desa, Kalender Musim dan Kelembagaan Desa, maka disusunlah Misi desa sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama, Sosial Budaya dan Ketentraman Masyarakat.
2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Sumberdaya Manusia;
3. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Pedesaan, Pariwisata dan Kesejahteraan Masyarakat;
4. Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Aparatur dalam Tata Kelola Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan pada Masyarakat;
5. **Arah Kebijakan Pembangunan Desa**

Kebijakan Pembangunan Desa Wonokerto akan diarahkan pada beberapa aspek, antara lain :

1. Pengalokasian anggaran berdasarkan skala prioritas agar program pemerintah desa dapat terlaksana secara cepat, tepat dan akurat yang ditunjang dengan peningkatan kesejahteraan aparatur dan lembaga yang ada dengan mengedepankan perbaikan manajemen pemerintahan dan pelayanan publik
2. Penataan administrasi pemerintahan desa
3. Memberdayakan lembaga yang ada dan mengoptimalkan kegiatan ekonomi guna menunjang Peningkatan daya beli masyarakat
4. Peningkatan sumber daya masyarakat agar masyarakat menjadi lebih produktif dan mampu berdaya saing menghadapai perkembangan lingkungan
5. Peningkatan Kegiatan Pembinaan Keagamaan
6. Peningkatan pengelolaan jalan Desa, jalan lingkungan, gang, , saluran air pertanian, sarana keagamaan serta infrastruktur lainn Menggerakan seluruh elemen masyarakat dalam swadaya guna mencapai target pembangunan di Desa.
7. Menggali potensi di wilayah desa guna menambah PAD Desa untuk menambah dana stimulant pemerintah dalam pembangunan yang ada di Desa.
8. Meningkatkan SDM masyarakat dengan mengadakan pelatihan – pelatihan khususnya di bidang pertanian dan Industri Rumah tangga untuk mendorong tingkat perekonomian masyarakat.
9. Membantu para petani dalam permodalan.
10. **Rencana Kegiatan Desa**

Sesuai dengan arah kebijakan yang ada di Desa Wonokerto yang meliputi empat bidang, maka untuk perencanaan kegiatan yang ada di Desa Wonokerto tetap berdasarkan empat bidang tersebut, yaitu :

* + 1. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan desa antara lain :

1. Penetapan dan penegasan batas Desa
2. Pendataan Desa
3. Penyusunan tata ruang Desa
4. Penyelenggaraan musyawarah Desa
5. Pengelolaan informasi Desa
6. Penyelenggaraan perencanaan Desa
7. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa
8. Penyelenggaraan kerjasama antar Desa
9. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Pengisian Perangkat Desa
10. Penghasilan dan Kesejahteraan Pemerintah Desa
11. Honor, Operasional Tim dan Lembaga Desa
12. Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
    * 1. Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa, kegiatan desa antara lain :
13. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan lingkungan Desa antara lain:
14. Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa
15. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani
16. Jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian
17. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan
18. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa
19. Pengembangan sarana dan prasarana produksi pertanian di Desa
20. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa
21. Pembangunan dan pengelolaan pembangkit listrik tenaga mikrohidro
22. Pembangunan dan pengelolaan sumber air
23. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
24. Air bersih berskala Desa
25. Sanitasi lingkungan
26. Pengembangan dan Pelayanan Kesehatan Desa
27. Pengelolaan dan Pembinaan Kesehatan Desa
28. Sarana dan prasarana kesehatan
29. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
30. Taman bacaan masyarakat/perpustakaan
31. Pembangunan dan Pengelolaan sarana prasarana Pendidikan anak usia dini
32. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini
33. Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat
34. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni
35. Sarana dan prasarana kegiatan kesenian
36. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
37. Pembangunan dan pengelolaan Pasar Desa dan kios Desa
38. Pembentukan dan pengembangan BUM Desa
39. Penguatan permodalan BUM Desa
40. Pembibitan tanaman pangan
41. Penggilingan padi
42. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa
43. Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan
44. Pembukaan lahan pertanian
45. Pembangunan dan Pengelolaan Kandang ternak
46. Mesin pakan ternak
47. Pengembangan benih lokal
48. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian
49. Pengembangan ternak secara kolektif
50. Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri
51. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
52. Penghijauan
53. Perlindungan terhadap satwa
54. Pengelolaan sampah secara terpadu
55. Perlindungan terhadap mata air
56. Pembersihan daerah aliran sungai
    * 1. Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa, kegiatan desa antara lain :
57. Pembinaan lembaga kemasyarakatan
58. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
59. Pembinaan kerukunan umat beragama
60. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga
61. Pengadaan sarana dan prasarana tempat ibadah
62. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat
63. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini
64. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni
    * 1. Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa, kegiatan desa antara lain :
65. Pelatihan usaha ekonomi produktif dan pertanian
66. Pelatihan teknologi tepat guna
67. Peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
68. Pelatihan peningkatan kualitas proses perencanaan desa
69. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
70. Penyelenggaraan sosialisasi/penyuluhan/seminar tentang kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat
71. Peningkatan Kesejahteraan Perangkat Desa
72. Pemberian bantuan masyarakat miskin/ penanggulangan kemiskinan
73. Peningkatan kapasitas masyarakat, melalui :
74. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
75. Kelompok Usaha Ekonomi Produktif
76. Kelompok Perempuan
77. Kelompok Tani
78. Kelompok Masyarakat Miskin
79. Kelompok pengrajin/ketrampilan khusus
80. Kelompok perlindungan anak
81. Kelompok Pemuda
82. Kelompok Kesenian
83. Kelompok Keagamaan
84. Kelompok Simpan Pinjam
85. Kelompok Tenaga Pengajar
86. Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

**BAB V**

**PENUTUP**

Dalam membuat perencanaan pembangunan desa diperlukan partisipasi dari masyarakat, tokoh masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Kepala Desa serta unsur masyarakat lain yang mendukung program pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa harus selaras dengan perencanaan yang ada di Kabupatan dan Nasional/Pusat. Pelaksanaan pembangunan desa haruslah berdasar pada empat bidang utama, yaitu Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Masyarakat dan Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan.

Sebagai upaya bersama untuk mewujudkan program-program pembangunan di desa, maka desa perlu menyususn dokumen perencanaan pembangunan desa yang berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJM Desa. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa yang berisi tentang program-program pembangunan desa selama Kepala Desa menjabat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Wonokerto memuat agenda – agenda, isu strategis dan strategi pembangunan yang akan dilaksanakan secara maksimal, sehingga hasil pembangunan selama Kepala Desa menjabat diharapkan mampu membawa masyarakat Desa Wonokerto menjadi lebih sejahtera, adil dan makmur yang berlandaskan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat desa sebagimana tertuang dalam Visi dan Misi Desa Wonokerto.

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

**DESA WONOKERTO KECAMATAN GUCIALIT**

**KABUPATEN LUMAJANG**

**NOMOR :**  **TAHUN 2017**

**TENTANG**

**KESEPAKATAN PERATURAN DESA TENTANG**

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA**

**( RPJMDes )TAHUN 2015 – 2020**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Menimbang** | : | 1. bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa; 2. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes); 3. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wonokerto Tahun 2015-2020. 4. bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan oleh Kepala Desa maka perlu dibahas dan disepakati Perubahan RPJMDes 2015-2020 antara kepala desa dan BPD sesuai dengan berita acara musyawarah desa penyusunan Revisi RPJMDesa 2015-2020. 5. bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD |
| **Mengingat** | : | 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 ) 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; 7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; 8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; 9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang, Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019; |
| **MEMUTUSKAN** | | |
| **Menetapkan** | : |  |
| **KESATU** | : | MEMBAHAS PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) TAHUN 2015 – 2020 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA. |
| **KEDUA** | : | MENYEPAKATI PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) TAHUN 2015 – 2020 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA |
| **KETIGA** | : | KESEPAKATAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL DITETAPKAN |

Ditetapkan di : Wonokerto

Pada Tanggal : 15 Maret 2017

Badan Permusyawaratan Desa

Ketua

**MASHURI**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA**

**KEPALA DESA DAN BPD**

Nomor : ...........................................

Nomor : ...........................................

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD**

**DESA WONOKERTO**

**TENTANG**

PERUBAHAN RENCANA JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDesa) TAHUN 2015-2020

Pada hari ini Rabu, tanggal Lima Belas bulan Maret Tahun Dua Ribu Tujuh Belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Hj. IMMA SAROH | : | Kepala Desa Wonokerto dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Wonokerto selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** |
| 1. MASHURI | : | Ketua BPD Desa Wonokerto dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Wonokerto selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** |

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Revisi RPJMDesa 2015-2020 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan Revisi RPJMDesa 2015-2020 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan Revisi dan koreksi atas RPJMDesa 2015-2020 selaras dengan Revisi dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Bupati Lumajang untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

|  |  |
| --- | --- |
| PIHAK PERTAMA  **Hj. IMMA SAROH** | PIHAK KEDUA  **MASHURI** |

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA**

PEMBAHASAN BPD TERHADAP PERUBAHAN RPJMDesa

TAHUN 2015-2020

Pada hari ini Rabu tanggal Lima Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di Desa Wonokerto, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, dalam rangka membahas revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2015 – 2020.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

1. Menyepakati revisi RPJMDesa 2015-2020 dengan rincian Terlampir dalam Lampiran Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengan Desa (RPJMDes)
2. Menyepakati perubahan RPJMDesa 2015-2020 setelah menyelesaikan revisi dan koreksi atas RPJMDesa 2015-2020 selaras dengan penyesuaian dan perubahan

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**DESA WONOKERTO**

1. Ketua MASHURI (……………………)
2. Wakil Ketua BUNASAN (……………………)
3. Sekretaris .................... (……………………)
4. Anggota HERO WICAKSONO (……………………)
5. Anggota EKO MULYONO (……………………)
6. Anggota SUPRIYADI (……………………)
7. Anngota ABDULLAH (……………………)

**DAFTAR HADIR**

ACARA : PEMBAHASAN PERUBAHAN RPJMDesa 2015-2020

DESA : WONOKERTO

KECAMATAN : GUCIALIT

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **NAMA** | **JABATAN** | **TANDA TANGAN** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Kepala Desa Wonokerto

**Hj. IMMA SAROH**



**KEPALA DESA WONOKERTO**

**KECAMATAN GUCIALIT KABUPATEN LUMAJANG**

**PERATURAN DESA WONOKERTO**

**NOMOR TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA WONOKERTO NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-Desa)**

**TAHUN 2015 – 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA WONOKERTO,**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Menimbang** | : | 1. bahwa untuk memberikan kejelasan arah pembangunan yang ingin dicapai diperlukan suatu Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang disusun berdasarkan visi, misi dan program kerja Kepala Desa; 2. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pada penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan BPD, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes); 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagamana huruf a dan b, perlu membentuk peraturan desa tentang perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa; |
| **Mengingat** | : | 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tetang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82); 3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 ) 4. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; 9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; 10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; 11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang, Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019; |
| **Dengan Kesepakatan Bersama**  **BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOKERTO**  **dan**  **KEPALA DESA WONOKERTO**  **MEMUTUSKAN :** | | |
| **Menetapkan** | : | PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-Desa) TAHUN 2015 - 2020 |

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang
3. Bupati adalah Bupati Lumajang
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Lumajang
6. Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;

**BAB II**

**TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERUBAHAN**

**RPJM-DESA 2015-2020**

**Pasal 2**

1. Rencangan RPJM-Desa disusun oleh Pemerintahan Desa;
2. Dalam menyusun rancangan. RPJM-Desa, Pemerintahan Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
3. Rancangan RPJM-Desa yang berasal dari Pemerintahan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu: LKMD, Lembaga Kemasyarakatan, PKK, KPM Tokoh Masyarakat, tokoh Agama, dan sebagainya;
4. Setelah menyusun rancangan RPJM-Desa, Pemerintahan Desa menyampaikan rancangan RPJMDes kepada BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa penyusunan RPJMDes untuk menbahas dan menyepakati rancangan RPJMDes menjadi dokumen RPJMDes dalam bentuk Peraturan Desa;
5. Musyawarah desa Penyusunan RPJMDes diselenggarakan oleh BPD yang dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat ;
6. Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDes sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen RPJMDes serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundangkan dalam Lembaran Desa

**BAB III**

**MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN**

**PERUBAHAN RPJM-DESA**

**Pasal 3**

1. Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDes sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen RPJMDes serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundangkan dalam Lembaran Desa;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDes berdasarkan musyawarah dan mufakat.

**BAB IV**

**VISI DAN MISI**

**Pasal 4**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Visi | : | Terwujudnya Masyarakat Desa Wonokerto Yang Berakhlak Mulia, Sejahtera dan Bermartabat dalam naungan Pemerintah Desa yang Demokratis dan Amanah |

**Pasal 5**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misi | : | 1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama, Sosial Budaya dan Ketentraman Masyarakat. 2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Sumberdaya Manusia; 3. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Pedesaan, Pariwisata dan Kesejahteraan Masyarakat; 4. Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Aparatur dalam Tata Kelola Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan pada Masyarakat; |

**BAB V**

**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**Pasal 6**

Strategi Pembangunan Desa :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintahan desa
2. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa
3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri;
5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

**Pasal 7**

Arah Kebijakan Keuangan Desa :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
4. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
5. Terwujudnya kualitas pemerintahan desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa.

**Pasal 8**

Arah Kebijakan Pembangunan Desa :

1. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
2. Intensif RT dan RW;
3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan BPD;
5. Program operasional Pemerintahan Desa;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program kebutuhan primer pangan;
9. Program pelayanan dasar pendidikan;
10. Program pelayanan kesehatan;
11. Program kebutuhan primer Sandang;
12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Program Ekonomi produktif;
14. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
15. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
16. Program dana bergulir.

**BAB VI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan peraturan RPJM-Desa ini akan diatur oleh Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

**Pasal 10**

1. Peraturan Desa tentang perubahan RPJM-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
2. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa

Ditetapkan di : WONOKERTO

Pada tanggal : 15 Maret 2017

**KEPALA DESA** **WONOKERTO**

**Hj. IMMA SAROH**

Diundangkan di : Wonokerto

Pada tanggal : 15 Maret 2017

**SEKRETARIS DESA** **WONOKERTO**

**MOCHAMAD LUKMAN NURHAKIM, SE**

LEMBARAN DESA WONOKERTO KECAMATAN GUCIALIT KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2017 NOMOR : ..............

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Allah Swt setelah melalui proses penggalian gagasan di setiap dusun dan kelompok sampai dengan musyawarah desa dalam rangka Menggagas Masa Depan Desa, tim penyusun yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, LKMD, Kepala Dusun, KPMD, Wakil Masyarakat, anggota BPD dan Perangkat Desa Wonokerto telah berhasil membahas dan menyepakati Dokumen perubahan RPJMDes.

RPJMDes adalah bagian dari perencanaan seluruh warga masyarakat Desa Wonokerto yang menginginkan masa depan desa yang lebih baik di segala bidang. Mimpi desa akan menjadi kenyataan ketika dimulai dengan perencanaan yang matang dan disertai kerja keras dan usaha untuk mewujudkannya.

Dokumen ini dalam penyusunannya telah melalui proses yang panjang dan melibatkan banyak orang dan merupakan pengalaman pertama bagi masyarakat dalam menyusun mimpi-mimpi desa dalam bentuk dokumen perencanaan desa.

Meskipun banyak kekurangan dalam penyusunan dokumen RPJMDes tetapi dokumen ini sudah cukup mewakili aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat karena disusun dengan prinsip lengkap, cermat, sistematis, partisipatif dan terbuka.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu Tim Penyusun dalam proses penyusunan RPJMDes ini sesuai dengan tahapan-tahapan yand diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan permendagri No 114 Tahun 2014 tengang Pedoman Pembangunan Desa

Harapan kami semoga Dokumen ini bisa menjadi landasan pijak dalam melaksanakan proses Pembangunan di Desa Wonokerto Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang dan semoga seluruh Rencana Pembangunan yang tersusun dalam dokumen RPJMDes ini bisa terealisasi sesuai dengan yang di cita-citakan masyarakat Desa Wonokerto.

Wonokerto, 15 Maret 2017

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

PERATURAN DESA

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB. I PENDAHULUAN 1

* 1. Latar Belakang 1
  2. Landasan Hukum 3
  3. Pengertian 5
  4. Maksud dan Tujuan 6

BAB. II PROFIL DESA 8

2.1 Kondisi Desa 8

2.1.1 Sejarah Desa 8

2.1.2 Demografi 9

2.1.3 Keadaan Sosial 13

2.1.4 Keadaan Ekonomi 14

2.1.5 Prasana dan Sarana 16

2.2 Kondisi Pemerintahan Desa 18

2.2.1 Pembagian Wilayah Desa 18

2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa 19

BAB. III MASALAH DAN POTENSI 21

3.1 Masalah dan Potensi dari Potret Desa 21

3.2 Masalah dan Potensi dari Kalender Musim 22

3.3 Masalah dan Potensi dari Kelembagaan Desa 24

BAB. IV RENCANA PRIORITAS PROGRAM 2015-2019 27

4.1 Visi dan Misi 27

4.1.1 Visi 27

4.1.2 Misi 28

4.2 Arah Kebijakan Pembangunan Desa 29

4.3 Rencana Kegiatan Desa 30

4.3.1 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 30

4.3.2 Pelaksanaan Pembangunan Desa 31

4.3.3 Pembinaan Kemasyarakatan Desa 33

4.3.4 Pemberdayaan Masyarakat Desa 34

BAB. V PENUTUP 37

LAMPIRAN-LAMPIRAN

|  |
| --- |
| **PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**  **KECAMATAN GUCIALIT**  **DESA WONOKERTO**  **Jl. Jenggala No. 02 Kode Pos 67353** |

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DESA WONOKERTO**

**NOMOR : 188/ /427.94.01/2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN**

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH**

**DESA BANJARANYAR TAHUN 2015-2020**

**KEPALA DESA WONOKERTO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan ayat 1 Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, Kepala Desa perlu membentuk tim penyusun RPJM Desa |
|  |  | 1. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa Tahun 2015- 2020. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mengingat | : | * 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;   2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;   3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;   4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;   5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;   6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;   7. Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa   8. Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa   9. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa   10. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;   11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;   12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015   13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;   14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;   15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 27 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;   16. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 29 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa;   17. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;   18. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019. |

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KESATU | : | Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wonokerto Tahun 2015-2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Tim sebagaimana di maksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :   1. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten / Kota; 2. Pengkajian keadaan Desa; 3. Penyusunan rancangan RPJM Desa; 4. Penyempurnaan rancangan RPJM Desa. |
| KETIGA | : | Biaya pelaksanaan Tim sebagaimana di maksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017. |
| KEEMPAT | : | Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya keputusan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di : WONOKERTO

Pada tanggal : 15 Maret 2017

**KEPALA DESA** **WONOKERTO**

**Hj. IMMA SAROH**

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Wonokerto

Nomor : 410/ /427.94.01/2017

Tanggal : 15 Maret 2017

**SUSUNAN TIM PENYUSUN**

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH**

**DESA WONOKERTO TAHUN 2015 - 2020**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **JABATAN** | **NAMA** |
| 1.  2.  3.  4. | Pembina  Ketua  Sekretaris  Anggota : . | Hj. IMMA SAROH  MOCHAMAD LUKMAN NURHAKIM, SE  SUNO   * SUWADI * AJI * IRMA FARIDA * ABDUL ROHMAN * BAWON ROSYID * HERU PURNOMO * TUTIK WAHYUNI * RUKMINI |

Kepala Desa Wonokerto

**Hj. IMMA SAROH**